

Media Cetak	Ujungpandang Ekspres
Tanggal	Rabu 20 November 2024
Wilayah	Kota Makassar



Dewan Minta BUMD Kota Makassar Dievaluasi

Dewan Minta BUMD Kota Makassar Dievaluasi

MAKASSAR, UPEKS-- DPRD Kota Makassar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan pembahasannya. Meski demikian, sejumlah kritik, catatan dan masukan disampaikan untuk menjadi perhatian Pemkot Makassar, salah satunya terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Fraksi NasDem melalui juru bicara (Jubir), A. Odhika Cakra Satriawan, menilai pengelolaan BUMD Kota Makassar perlu dievaluasi, khususnya bagi BUMD yang tidak lagi memberikan deviden kepada pemerintah kota, meskipun memiliki aset besar dan

potensi deviden yang signifikan.

Dia juga mengatakan, sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan pembentukan holding company BUMD. "Bentuk ini memungkinkan beberapa BUMD lebih efisien dan terintegrasi, dikelola di bawah satu payung organisasi yang bertindak sebagai pusat pengendalian dan koordinasi," ujarnya dalam Rapat Paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2025, Selasa (19/11/2024).

Sementara itu, Fraksi PKS melalui Jubirnya, Hartono menyoroti penurunan signifikan target pendapatan di komponen Retribusi Daerah hingga 54%, serta target pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah

yang terpisah, yang turun hingga 42,1%. "Jika dilihat dari nilai nominalnya, penurunan ini mencapai kurang lebih Rp88 miliar. Akan tetapi dari segi persentasi kondisi awal, penurunannya sangat tinggi," ungkapnya.

Fraksi PKS, kata Hartono, menolak solusi penurunan target pendapatan sebagai respon atas kinerja buruk pengelola BUMD. Menurutnya, BUMD Kota Makassar seharusnya malu jika target pendapatan diturunkan hingga hampir 50%. Ini menunjukkan kegagalan dalam pengelolaan.

Olehnya itu, dia mendesak jajaran pengurus BUMD, termasuk Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan Direksi, segera dievaluasi. "De-

mikian pula dalam pembahasan RUPS agar dapat ditinjau kembali seluruh komponen pembagian laba usaha, termasuk meninjau kembali untuk mengganti jajaran pengurus BUMD yang gagal," ujarnya.

Sebagai informasi, sembilan perwakilan membacakan pandangan masing-masing fraksi, yakni Jubir Fraksi PKB, Fahrizal Arrahman Husain; Jubir NasDem, A. Odhika Cakra Satriawan; Jubir Fraksi PKS Hartono; Jubir Fraksi MULIA, Tri Zulkarnain Ahmad; Jubir Fraksi PPP, Fasruddin Rusli; Jubir Fraksi Gerindra, Farid Rayendra; Jubir Fraksi PDIP, William Laurin; Jubir Fraksi Golkar, Ruslan Mahmud dan Jubir Fraksi API, Yulius Patandianan. (jir/rif)